

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KAMPAR



Oleh:

NENSY SILVIA
145310280

PROGRAM STUDI AKUNTANSI – S1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KAMPAR

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Riau*



Oleh:

NENSY SILVIA
145310280

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI – S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nensy Silvia
NPM : 145310280
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:
PEMBIMBING

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

29/2/22

KETUA PRODI



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

NOTULENSI SEMINAR SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : **Nensy Sivia**
2. NPM : 145310280
3. Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021
4. Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar

Sidang dibuka oleh **Yolanda Pratami, SE., M.Ak** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

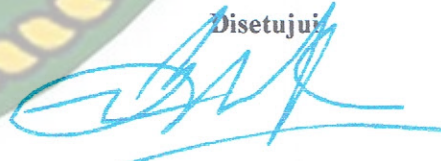
No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dr. H. Abrar, SE. M.Si., Ak.,CA <ul style="list-style-type: none">Perbaikan judulPerumusan masalahHipotesisOperasional variabelTeknik analisis dataHasil penelitian disajikan	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat pada halaman 2 Terlihat pada halaman 6 Terlihat pada halaman 35 Terlihat pada halaman 38	
2	Yolanda Pratami, SE., M.Ak <ul style="list-style-type: none">Sistematika penulisan	Sudah di perbaiki	Terlihat pada halaman 6	

Mengetahui,



Dr. Siska, SE. M.Si Ak, CA.
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui



Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL

1. Nama Mahasiswa : **Nensy Sivia**
2. NPM : 145310280
3. Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
4. Judul Penelitian : Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar

Sidang dibuka oleh **Halimahtussadiyah, S.E.,M.Ak.,CA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Yusrawati, SE. M.Si <ul style="list-style-type: none">• Koesioner sesuaikan• Hipotesis operasional variabel• Indikator• Perumusan masalah	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Terlihat pada halaman 3 Terlihat pada halaman 13 Terlihat pada halaman 33-36 Terlihat pada halaman 37	
2	Alfurkaniati, SE., M.Si Ak.CA.. <ul style="list-style-type: none">• Metode penulisan• Hipotesis• Sistematika penulisan	Sudah di perbaiki	Terlihat pada halaman 5	

Mengetahui,



Dr. Siska SE. M.Si Ak. CA.
Ketua Prodi Akuntansi S1

Disetujui



Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA
Pembimbing

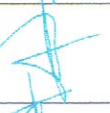


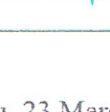
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alama : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NENSY SILVIA
NPM 145310280
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KAMPAR


NAMA PEMIMBING : Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tanggal	Catatan Pemimbing	Berita Acara	Paraf
7/12/2018	- Latar Belakang Terlalu Panjang - Rumusan masalah	- Bab I	
15/12/2018	- Latar Belakang Lagi - Urutan Pembahasan	- Bab I	
15/01/2019	-Latar Belakang	-Latar Belakang	
30/01/2019	- Penjelasan Metode Penelitian - Telaah Pustaka - Manfaat Penelian	- Bab I - bab II	
26/02/2019		-Acc Proposal	
17/12/2021	-Tambah Penjelasan - Koesioner lengkapi - Cari jurnal yang sama dengan beberapa hipotesis - Metode penelitian	- Bab IV - Bab IV Pembahasan - Teknis Keseluruhan	
20/12/2021		-Acc Skripsi	

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Wakil Dekan I



Dina Hidayat, SE., Msi., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 1774/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 20 Desember 2021, Maka pada Hari Selasa 21 Desember 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

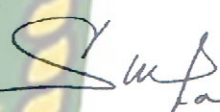
- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Nensy Silvia |
| 2. N P M | : 145310280 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. |
| 5. Tanggal ujian | : 21 Desember 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 65,5 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN




Ketua

Sekretaris


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

- | | |
|--|---|
| 1. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA | (..... ) |
| 2. Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA | (..... ) |
| 3. Yolanda Pratami, SE., M.Ak | (..... ) |

Notulen

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Haugesti Diana, SE., M.Ak | (..... ) |
|------------------------------|--|

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Mengetahui
Dekan,


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 1774 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Nensy Silvia
N P M : 145310280
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

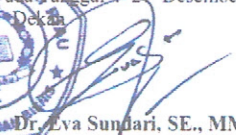
2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., CA	Lektor, C/d	Materi	Ketua
2	Dr. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Asisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Dekan


Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

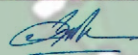
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Nensy Silvia
NPM : 145310280
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Selasa 21 Desember 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA		


Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Yolanda Pratami, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 65)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 21 Desember 2021
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

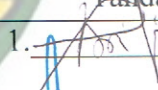


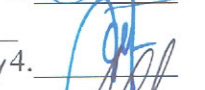


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nensy Silvia
 NPM : 145310280
 Judul Proposal : Pengaruh Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar
 Pembimbing : 1. Dr.Kasman Arifin,SE.MM.Ak
 2. Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA
 Hari/Tanggal Seminar : Selasa, 26 Februari 2019

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

- 1.Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
- 2.Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
- 3.Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
- 4.Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
- 5.Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
- 6.Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
- 7.Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
- 8.Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
- 9.Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
- 10.Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
- 11.Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
- 12.Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
- 13.Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
- 14.Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasman Arifin, SE., MM., Ak		1. 
2.	Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si,Ak,CA		2. 
3.	Yusrawati, SE., M.Si		3. 
4.	Alfurkaniati, SE., M.Si.,Ak.,CA		4. 
5.	Siska, SE., M.Si., Ak., CA		5. 
6.	Halimahtussadiyah, SE.,M.Ak.,CA		6. 

Coret yang tidak perlu



Mengetahui
 An.Dekan bidang akademis

Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA

Pekanbaru, 26 Februari 2019
 Sekretaris,



Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 615/Kpts/FE-UIR/2018
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr. Kasman Arifin, SE., MM., Ak	Lektor Kepala, D/a	Pembimbing I
②	Dra. Eny Wahyuningsih, SE., M.Si., Ak.	Lektor, C/c	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Nensy Silvia
 N P M : 145310280
 Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
 Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Prinsip – Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
 Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 24 Juli 2018
 Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : NENSY SILVIA
NPM : 145310280
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 15 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Seksi Program Studi Akuntansi



Siskah SE, M.Si., Ak., CA

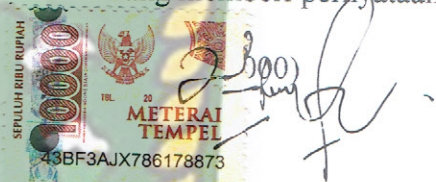
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseuruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 26 Maret 2022
Yang memberi pernyataan,



Nensy Silvia
NPM: 145310280

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah good governance mempengaruhi kinerja keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kampar. Penelitian ini penting dilakukan karena tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparansi, akuntabilitas, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme menjadikan pemerintahan yang lebih baik agar tercapai kinerja keuangan yang unggul, sehingga dalam pengolahannya diperlukan adanya *good governance*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Teknik analisa data yang digunakan yaitu regresi linier sederhana.

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, ternyata Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kampar telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik, hal ini terlihat dari karakteristik yang telah ditetapkan, yaitu terdiri dari prinsip-prinsip *good governance* seperti adanya partisipasi, aturan hukum, transparansi, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, sehingga dapat menunjang keefektifan kinerja keuangan. Berdasarkan hasil analisis determinasi diperoleh nilai R sebesar 0,63 atau 62,3%% dapat disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kampar berpengaruh sedang dengan tingkat persentasi 62,3%% sedangkan sisanya sebesar 37,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar regresi ini yaitu seperti variabel lain yang tidak diteliti seperti prinsip visi strategis, daya tanggap, berorientasi consensus, sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi.

Kata Kunci : *Good Governance*, Dan Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing whether *good governance* affects the financial performance of the Department of Trade and Industry of Kampar Regency. superior financial performance, so that in its processing it is necessary to have *good governance*.

This type of research uses a quantitative analytical descriptive method. The data collection technique used a questionnaire/questionnaire. The sampling technique in this study used the saturated sampling method. The data analysis technique used is simple linear regression. From the research results obtained by the author, it turns out that the Trade and Industry of Kampar Regency has implemented the principles of good governance well, this can be seen from the predetermined characteristics, which consist of the principles of good governance such as participation, the rule of law, transparency, effectiveness and efficiency, accountability, so as to support the effectiveness of financial performance.

Based on the results of the analysis of determination obtained an R value of 0.63 or 62.3%%, it can be concluded that the Implementation of *Good Governance* Principles on Financial Performance in Trade and Industry in Kampar Regency has a moderate effect with a percentage level of 62.3%% while the remaining 37, 7% is influenced by other factors outside of this regression, such as other variables not examined, such as the principle of strategic vision, responsiveness, consensus orientation, internal control systems, and accounting information systems.

Keywords: *Good Governance*, and Financial Performance.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kampar**”, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan dukungan. Maka kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Eva Sundari, SE.,MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. H. Kasman Arifin, SE.,MM., Ak.,CA.,CISA selaku Pembimbing I penulis, yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Eny Wahyuningsih,SE,M.Si,Ak,CA selaku Pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau beserta Staff-Staffnya, yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda **Nasrul** dan ibunda **Fitriani** yang selalu mendoakan penulis dan tidak pernah merasa lelah memberikan dukungan, pengorbanan, dan motivasi serta mencurahkan kasih sayang dan perhatian demi tercapainya cita-cita penulis.

7. Ucapan terima kasih kepada nenek tercinta penulis yaitu nenek Roslaini, terima kasih tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Kepada keluarga besar penulis terutama adek penulis yakni Indra wahyudi, Rafiki, dan Kevin Ramadhan terima kasih atas segala dukungannya.
9. Penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Winda Astika Sari, SE dan Meilinda Nursyafii, S.Pd yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti semoga kita semua menjadi orang-orang sukses.
10. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, *Jazakumullah Khairan Katsiron* atas bantuan yang telah kalian berikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis

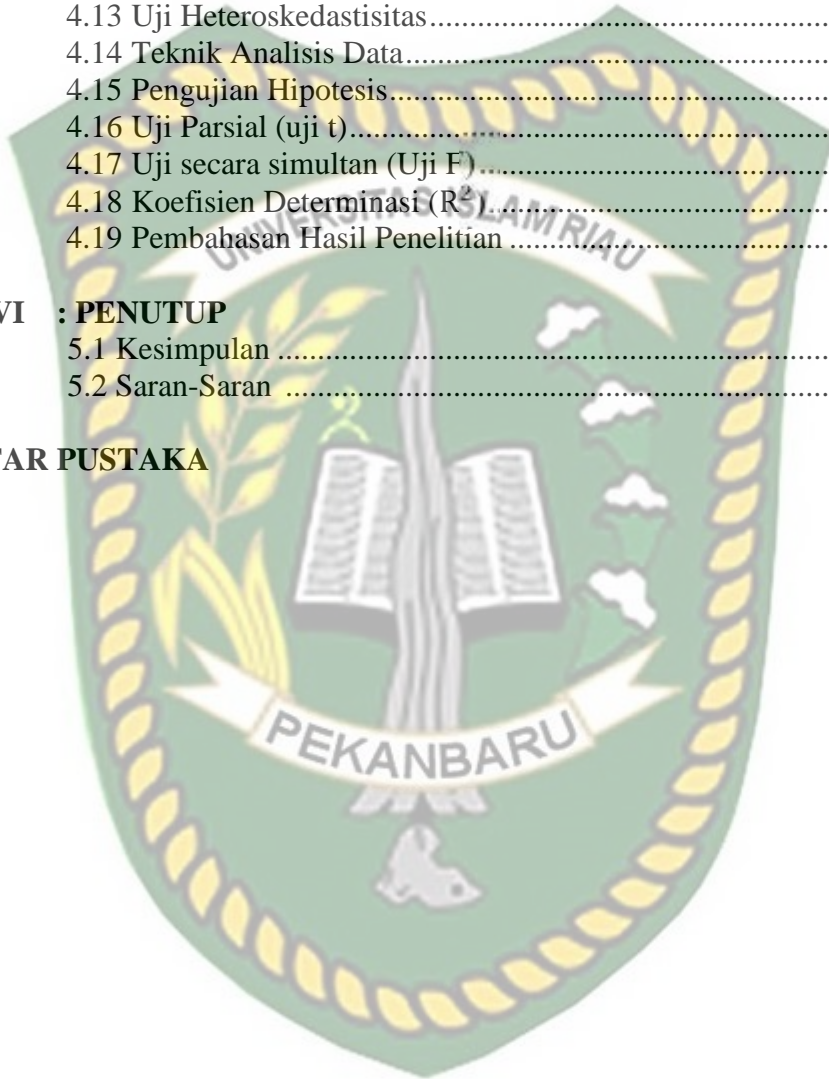
Nensy Silvia

145310280

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematis Penulisan	7
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	9
2.1.1 <i>Good Governance</i>	9
2.1.2 Kinerja Keuangan	18
2.1.3 Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan	23
2.1.4 Penelitian Terdahulu	25
2.1.5 Model Penelitian	26
2.1.6 Hipotesis	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	29
3.2 Defenisi Operational dan Pengukuran Variabel	29
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Uji Kualitas Data	33
3.7 Uji Asumsi Klasik	35
3.8 Teknik Analisis Data	36
3.9 Uji Hipotesis	37
3.10 Koefisien Determinasi (R ²)	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	40
4.3 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	42
4.4 Hasil Pengumpulan Data dan Demografi Responden	44
4.5 Statistik Deskriptive	45
4.6 Uji Kualitas Data	46
4.7 Uji Validitas	46

4.8 Uji Reliabilitas	47
4.9 Uji Asumsi Klasik	48
4.10 Uji Normalitas Data	48
4.11 Uji Multikolinieritas	49
4.12 Uji Heteroskedastisitas	49
4.13 Uji Heteroskedastisitas	49
4.14 Teknik Analisis Data	50
4.15 Pengujian Hipotesis	52
4.16 Uji Parsial (uji t)	52
4.17 Uji secara simultan (Uji F)	54
4.18 Koefisien Determinasi (R^2)	55
4.19 Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB VI : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



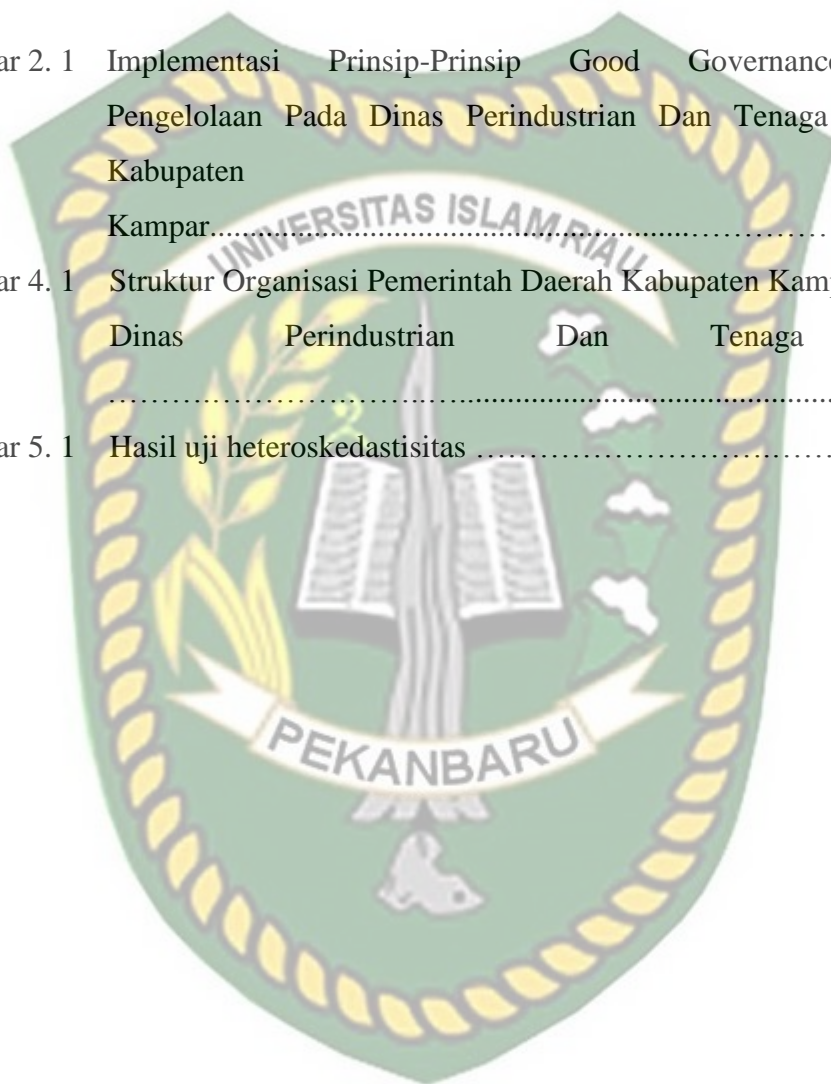
DAFTAR TABEL

Tabel Halaman		
Tabel 2. 1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1	Indikator Variabel dan Skala Pengukuran	30
Tabel 5. 1	Jumlah Sampel dan Tingkat Pengambilan Sampel.....	44
Tabel 5. 2	Demografi Responden	44
Tabel 5. 3	Descriptive Statistics	45
Tabel 5. 4	Hasil Uji Validitas Data.....	47
Tabel 5. 5	Hasil Uji Reliabilitas	47
Tabel 5. 6	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	48
Tabel 5. 7	Uji Multikolinearitas Persamaan Regresi 1	49
Tabel 5. 8	Hasil analisis regresi linier berganda pada persamaan regresi	50
Tabel 5. 9	Uji Parsial (Uji t)	52
Tabel 5. 10	ANOVA ^a	54
Tabel 5. 11	Model Summary ^b	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2. 1	Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kampar.....	27
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	41
Gambar 5. 1	Hasil uji heteroskedastisitas	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem desentralisasi memberikan keleluasan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang luas dan bertanggung jawab, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan dari konsep otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan wahana bagi daerah untuk dapat lebih mendekatkan berbagai kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil yang langsung menyentuh terhadap pelayanan masyarakat (*public service*). Pembangunan sektor publik dalam meningkatkan pelayanan publik adalah dengan cara mewujudkan/menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berarti manajemen yang dijalankan dengan kompeten untuk mengurus sumber daya negara secara terbuka, akuntabel, adil, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Secara konseptual, *good governance* artinya adalah serangkaian proses pengelolaan pemerintahan yang melibatkan semua *stakeholder* yang ada di daerah dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan

serta manusia untuk kepentingan semua pihak (pemerintah, swasta, dan rakyat) dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Jika tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan baik tentu kinerja suatu instansi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari instansi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja instansi itu sendiri (Budi Mulyawan, 2009).

Mahsun (2013: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan bagian krusial bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* yang digunakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran.

Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan Good governance merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (public services) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Good Governance diantaranya adalah (1) Partisipasi (*participation*) artinya keikutsertaan dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan organisasi, (2) Kepastian Hukum (*rule of law*) artinya mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, (3) Transparansi (*transparency*) artinya menciptakan kepercayaan timbal-balik melalui penyediaan informasi, (4) Responsif (*responsiveness*) artinya meningkatkan kepekaan para pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, (5) Orentasi Konsensus (*concensus orientation*) artinya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, (6) Kesetaraan (*equity*) artinya yaitu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota untuk meningkatkan kesejahteraannya, (7) Efisien dan Efektif (*efficiency and effectiveness*) artinya menjamin

terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, (8) Akuntabilitas (*accountability*) artinya yaitu usaha meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan organisasi, dan (9) Visi Strategis (*strategic vision*) artinya membangun organisasi berdasarkan visi strategis dan mengikutsertakan dalam proses pembangunan dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan (Wiwin:2018).

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari (1) Kepala Dinas, (2) Sekretaris yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Aset, (3) Seksi Bidang yang terdiri dari Seksi Bidang Pengembangan Potensi Industri, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah, Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan Kondisi di Pemerintah Kabupaten Kampar, Khususnya pada Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja di Kabupaten Kampar, pada kenyataannya kinerja masih belum optimal, antara lain dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, moral petugas, serta masih belum transparansi nya informasi tentang keuangan kepada publik. dan masih kurang profesionalismenya aparatur pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, masih tingginya pelanggaran disiplin dan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan suatu kegiatan belum sepenuhnya berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai prosedur kantor, masih rendahnya kualitas kinerja sumber daya manusia aparatur khusus nya di bidang keuangan

Terkait permasalahan lain yang muncul tentang kinerja keuangan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar terdapat beberapa kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, seperti adanya keterlambatan dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk perjalanan dinas, keterlambatan pembayaran keuangan untuk gaji PNS dan Non PNS terutama diawal-awal tahun.

Dengan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *good governance* tersebut tercemin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis risiko atau hasil, investasi yang berlebihan pada saat yang tidak produktif yang pada akhirnya menurunkan atau pudarnya kepercayaan para masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin melihat pengaruh implementasi prinsip – prinsip *good governance* terhadap kinerja keuangan pada

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Berdasarkan uraian di atas, setiap lembaga atau instansi pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya menerapkan prinsip *good governance* dan manfaatnya mulai terasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kampar."

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan latar belakang permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penerapan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai oleh penulis.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang Implementasi prinsi-prinsip *good governance* dalam

pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten kampar.

- b. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dan pengujian terhadap Implementasi prinsi-prinsip good governance dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten kampar.
- c. Bagi praktisi, sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan Implementasi prinsi-prinsip good governance dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Ini Dibagi Menjadi Beberapa Bagian, Dan Masing-Masing Bagian Menjelaskan Hal-Hal Sebagai Berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini dikemukakan mengenai lokasi dan objek penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang lokasi perusahaan yang menjadi sampel responden meliputi letak lokasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dan saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian *Good Governance*

Kata *governance* dalam bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti pemerintahan, pengelolaan. Dasar kata penadbiran adalah *tadbir*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal mengurus atau mengatur (memimpin/mengelola), pemerintahan, dan administrasi. Sedangkan penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata *government* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009).

Sedangkan arti *good* dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Sedarmayanti (2009:274) :

Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

Cadbury Committee dalam Budiharta & Gusnadi (2008), mengemukakan bahwa *corporate governance* :

Merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antarapemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Pengertian *Good Governancemenurut* Sinambela (2011 : 47) :

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan .

United Nation Development Program (UNDP) sendiri (dalam Suhady, 2009:50) mendefinisikan :

Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society).

Menurut Sedarmayati (2003:76) dalam Imade Artana (2014)

Good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang

dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Krina (2013) menyatakan bahwa Good governance merupakan tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Ulum dan Sofyani (2016) mengungkapkan bahwa good governance meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. *Good governance* juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. *Good Governance* berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

a) Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dengan prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak

ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip good governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Artana (2014) memaparkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Dengan *good governance* akan menjamin bahwa korupsi diminimalkan, pandangan minoritas diperhitungkan, dan bahwa suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. *Good governance* juga reponsif terhadap kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat (Siti Aminah, 2014). Menurut UNDP (United Nation Development Program) dalam Budi Mulyawan (2009) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparency)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002) dalam Wiwin (2018), menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Transparency International, undang-undang *Freedom of*

Information (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut (Karina (2009 : 19).

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah.

2. Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Terutama member kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan.

Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89). Selanjutnya, Sedarmayanti (2004:289) dalam Budi (2009), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholder). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan

gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

4. Keefektifan dan Efisiensi

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

5. Aturan Hukum/Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi dan tanggung jawab dengan seoptimal mungkin.

6. Responsif

Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, yakni pemimpin yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya. Pimpinan harus bisa menganalisa kebutuhan kebutuhan pegawai serta masyarakat, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

7. Orentasi Konsensus

Artinya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

8. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh pimpinan dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan yang baik harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

9. Visi Strategis

Artinya membangun daerah berdasarkan visi strategis dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena

perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

b) Tujuan Penerapan Good Governance

Secara sederhana FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) dalam Budi (2009) menyatakan bahwa tujuan dari *good governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Forum ini menegaskan bahwa penerapan dari *good governance* bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran pemerintahan yang ditetapkan telah tercapai dan aset pemerintahan terjaga dengan baik. Tujuan lainnya adalah agar pemerintahan dapat menjalankan praktik-praktik kinerja yang sehat, kegiatan yang transparan dan terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial-ekonomi pemerintahan (Jubaedah: 2007).

Good governance lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. Selain itu *good governance* lebih diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah :

- 1) Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnyaberbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 2) Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
- 3) Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- 4) Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
- 5) Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Good governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial, selain itu *good governance* dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi suatu entitas secara keseluruhan.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas instansi pemerintahan. Kinerja suatu instansi pemerintahan dapat dilihat melalui laporan keuangan instansi pemerintahan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu.

a) **Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja**

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja keuangan merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Sabrinna, 2010).

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti telah membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan dan lainnya (Fahmi, 2011). Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2010).

Tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus memanfaatkan keunggulan dari kekuatan perusahaan dan secara terus menerus memperbaiki kelemahan yang ada. Salah satu caranya adalah mengukur kinerja keuangan dengan menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan (Mayangsari dan Andayani, 2015).

Kinerja keuangan merupakan analisis keuangan yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja yang terjadi di masa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis. Sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan dan potensi kinerja yang akan berlanjut (Endri dan Wakil, 2008).

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan kinerja

perbankan adalah tingkat pencapaian hasil untuk mewujudkan tujuan perbankan. Kinerja merupakan pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standart. Pengukuran kinerja instansi pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Kinerja instansi merupakan gambaran kondisi keuangan instansi pemerintahan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Lestari, 2015).

b) Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Hasibuan (2012:75) tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa.
2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana pegawai bisa sukses dalam pekerjaannya.
3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam pemerintahan.
4. Sebagai dasar mengevaluasi program latihan dan keefektivan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja.
5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi pegawai yang berada di dalam pemerintahan.
6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performa kerja yang baik.
7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan (supervisor, managers, administrator) untuk mengobservasi perilaku bawahan (subordinate) supaya diketahui minat dan kebutuhan-kebutuhan bawahannya.

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan pegawai selanjutnya.
9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan pegawai.
10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan.
11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan pegawai.
12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan megembangkan uraian pekerjaan (job description)".

Adapun menurut Sunyoto (2012:45) manfaat penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.
2. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan pegawai.
3. Sebagai dasar mengevaluasi aktivitas seluruh kegiatan dalam organisasi atau perusahaan.
4. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi pegawai yang ada dalam organisasi.
5. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasaan, dan kondisi kerja.
6. Sebagai alat untuk melihat kekurangan dan kelemahan serta untuk meningkatkan kemampuan pegawai kembali.
7. Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya.
8. Sebagai dasar untuk mengembangkan uraian tugas para pegawai".

c) Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut S. Munawir (2010) pengertian kinerja keuangan adalah Prestasi kerja yang telah diperoleh suatu instansi pemerintahan dalam periode tertentu dan terutang dalam laporan keuangan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Irhan Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau perusahaan yang dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang dilihat, baik dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya. Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utamabagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dari periode ke periode.

Dalam upaya menilai kondisi kesehatan instansi pemerintahan melalui tingkat kinerjanya serta melihat perkembangan suatu instansi pemerintahan, seorang analisis laporan keuangan memerlukan alat ukur yang dapat membantu pekerjaannya.

Menurut Prawirosentono (2008 : 57) terdapat empat indikator Kinerja Pegawai, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi, merupakan hal yang berkaitan erat dengan ketercapaian hasil. Efektif belum tentu efisien. Bila tujuan tercapai bisa dikatakan kegiatan tersebut efektif. Akan tetapi apabila dalam melakukan kegiatan terdapat banyak akibat-akibat yang lebih besar, sehingga menimbulkan ketidakpuasan walaupun tujuan tercapai, hal tersebut berarti tidak efisien.
2. Otoritas dan tanggung jawab, merupakan hak pegawai untuk memberikan perintah dan pegawai tersebut menjadi bagian yang tidak terlepas dari kepemilikan perintah. Otoritas berhubungan dengan komunikasi formal dari seorang pegawai kepada pegawai lain untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan kontribusi. Tanggung jawab adalah sifat dari komunikasi formal yang dimiliki pegawai dalam menjalankan kegiatan.
3. Disiplin, yaitu sikap taat dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara organisasi dan pegawai. Disiplin berkaitan dengan hukum, peraturan, dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar.
4. Inisiatif, sangat berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam bentuk ide yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam mencapai kualitas dan kuantitas kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tentu pegawai juga harus memperhatikan otoritas dan tanggung jawab pegawai tersebut di dalam organisasi. Oleh karena itu, variabel Kinerja Pegawai dalam penelitian ini menggunakan indikator terkait dengan efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin.

2.1.3 Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan pada perindustrian Kinerja Keuangan

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik berupa sistem yang mengatur dan mengontrol urusan negara pada semua tingkat, terkait dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berada di dalamnya. *Good Governance* berperan sebagai alat ukur untuk menilai Kinerja Pegawai, termasuk pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, yang lebih menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Pemahaman *Good Governance* tak lepas dari pemahaman prinsip - prinsip yang terkandung di dalamnya. Pegawai bidang keuangan pemerintah daerah yang mempunyai pemahaman *Good Governance* secara tepat dan benar, tentu akan sangat berpengaruh terhadap profesionalitas Kinerja Pegawai tersebut dalam berkarya, dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan oleh organisasi.

Pemahaman prinsip-prinsip *Good Governance* yang kuat akan menimbulkan dampak positif dari Kinerja Pegawai, termasuk pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar khususnya pada Dinas Perindustrian Dan Ketenaga Kerja Kabupaten Kampar. Pegawai tersebut akan melakukan

pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga kinerjanya akan semakin meningkat. Namun, apabila pemahaman pegawai terhadap prinsip - prinsip *Good Governance* rendah, maka pegawai tersebut, dalam melakukan pekerjaannya tidak akan menanamkan prinsi-prinsip *Good Governance*, Kinerja Pegawai yang dihasilkan pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar khususnya pada Dinas Perindustrian Dan Ketenaga Kerja Kabupaten Kampar buruk.

Menurut Muh. Arief Effendi (2009) ada hubungan antara *good governance* dengan kinerja keuangan instansi pemerintahan yaitu Prinsip-prinsip *good governance* merupakan salah satu faktor kunci sukses untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan instansi pemerintahan mencerminkan bahwa instansi pemerintahan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga bagi instansi pemerintahan yang telah go public akan lebih dipercayai oleh para masyarakat dan akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan instansi pemerintahan tersebut. Bisa disimpulkan bahwa struktur pada *good governance* memberikan pengaruh yang positif untuk kinerja instansi pemerintahan pada penelitian yang dilakukan.

Dari paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mereplikasi penelitian sebelumnya dengan sampel penelitian yang berbeda dan tahun penelitian yang berbeda. Penelitian ini untuk mengetahui bukti empiris

mengenai penerapan prinsip instansi pemerintahan yang mempengaruhi kinerja keuangan instansi pemerintahan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh implementasi *good governance* terhadap kinerja keuangan telah dilakukan beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Desna Arani (2010)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh	Variabel (X) : Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel (Y) : Kualitas Informasi Keuangan SKPD	<i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan daerah, begitu juga dengan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan daerah
Elvira Zeyn (2011)	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan.	Variabel (X) dalam penelitian ini yaitu : <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel (Y) : Akuntabilitas Keuangan.	Penerapan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, kemudian standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
Kemal Supriadi, Unggul Purwohedhi, Nuramalia Hasanah	Penerapan Prinsip – Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja	Variabel (X) : Penerapan Prinsip – Prinsip <i>Good Governance</i> Variabel (Y) : Terhadap Kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi nirlaba.

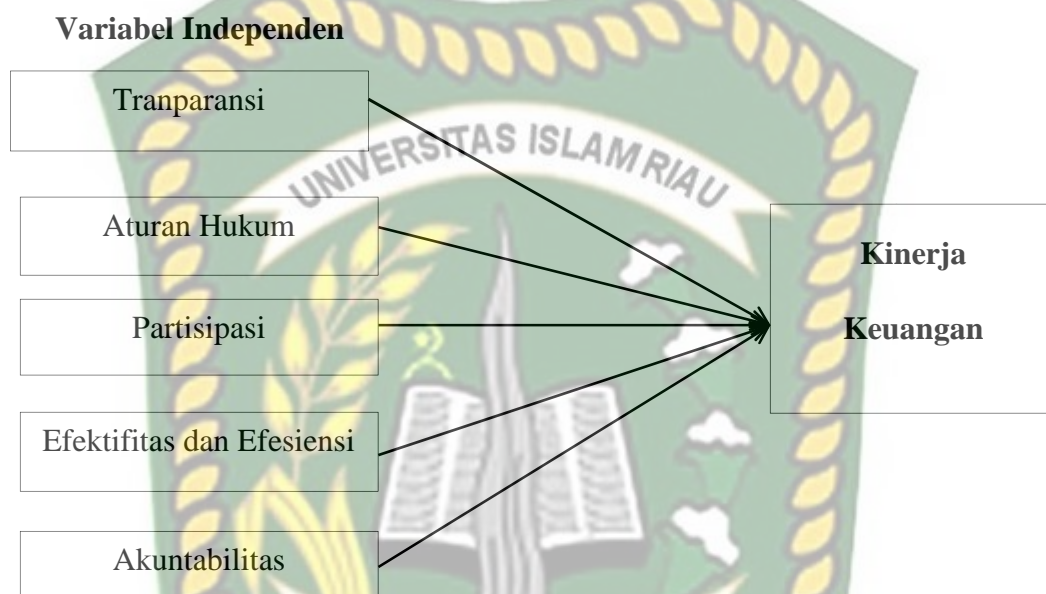
(2013)	Keuangan Organisasi Nirlaba	Keuangan Organisasi Nirlaba	
Wiwin Sabfitri (2018)	Pengaruh implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.	Variabel (X) dalam penelitian ini yaitu, penerapan prinsip <i>good governance</i> Variabel (Y) : kinerja keuangan	prinsip <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis.

2.1.5 Model Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai implelementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten kampar. Variabel Terikat (Dependent) yang digunakan adalah kinerja keuangan sedangkan variabel Bebas (Independent) adalah *good governance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar

II.1

Gambar II.1
Impelementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Pada
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar



2.1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis di dalam peneltian ini yaitu :

- H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
- H2: Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
- H3: Aturan Hukum berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
- H4: Efektifitas dan Efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

H5: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

H6: Prinsip – Prinsip *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Masalah yang diteliti adalah pengaruh implementasi good governance terhadap kinerja keuangan.

3.2 Defenisi Operational dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2008), variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan kemudian selanjutnya ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Variabel Terikat (*Dependent Variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan (Y) Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
- 2) Variabel Bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance yang terdiri dari Partisipatif (X_1), Aturan Hukum (X_2), Transparansi (X_3), Efektivitas dan Efisiensi (X_4), dan Akuntabilitas (X_5).

Tabel III.1

Indikator Variabel dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Transparansi (X1)	Transparansi merupakan Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyesuaian dan implementasi kebijakan publik. 2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, dan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. 	Skala Likert Lima Poin
Partisipasi (X2)	Partisipasi merupakan keikutsertaan, peran serta keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan atau program yang sedang berlangsung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif 2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas <i>consensus</i> bersama.. 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah. 	Skala Likert Lima Poin
Aturan Hukum (X3)	Aturan hukum merupakan perwujudan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian dan penegak hukum. 2. Adanya pemahaman terhadap hukum yang dilakukan atas dasar keadilan. 3. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum. 	Skala Likert Lima Poin

	dalam masyarakat.		
Efektifitas dan Efisiensi (X4)	Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal. 2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan. 3. Berkurangnya tumpah tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. 	Skala Likert Lima Poin
Akuntabilitas (X5)	Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. 3. Berorientasi pada kepentingan public sehingga dapat mengurangi kasus-kasus KKN 	Skala Likert Lima Poin
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan adalah gambaran prestasi gambaran prestasi yang dicapai pemerintah dan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, dan penyaluran dana,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi :Sejauh mana organisasi sektor public dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 2. Efisiensi :Sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan ini tidak menggunakan banyak 	Skala Likert Lima Poin

	aspek teknologi maupun aspek sumber daya manusianya.	dana namun tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasikan.	
		3. Efektifitas :Proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.	

3.3 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Sugiyono (2008), populasi adalah wilayah generalisasi berisi baik subjek maupun objek yang mempunyai karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang berjumlah 53 pegawai.

2) Sampel

Sampel merupakan prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang di ambil dan dipergunakan untuk menentukansifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus. Sampel yang digunakan adalah pegawai yang bekerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang memiliki kriteria dimana dalam pekerjaannya berhubungan dengan bagian keuangan, bagian sekretariat. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Umar, 2003). Sumber data primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada sampel terpilih dari pegawai keuangan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber data yang dicatat oleh pihak lain (Umar, 2003). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat berupa data-data yang berasal dari artikel-artikel dan karya ilmiah yang dipublikasikan di internet serta berbagai literatur yang mendukung permasalahan seperti buku, majalah, artikel dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode analisis data deskripsi. Langkah yang diambil untuk mengantisipasi rendahnya tingkat respon (*respond rate*) adalah dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur, validitas ini menyangkut akurasi instrument (Juliansyah Noor, 2011; 132). Suatu instrument yang valid mempunyai validitas

tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur yang diinginkan serta dapat mengungkapkan data dari validitas yang diteliti secara tepat.

Penguji validitas menggunakan koreksi yang dilakukan dengan menghitung koreksi antar skor variabel. Uji validitas dapat diketahui dengan melihat r hitung, apabila r hitung sig. $\leq 0,05$ = valid dan r hitung sig. $>0,05$ = tidak valid (Ghozali, 2011).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan dari waktu ke waktu. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur data yang sama (Juliansyah Noor, 2011; 131).

Penguji ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrument dalam satu variabel. Suatu variabel disebut reliable apabila hasilnya $a \geq 0,60$ maka hasilnya adalah reliable sedangkan hasil $a \leq 0,60$ maka hasilnya tidak reliable

4. Uji Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik menurut Imam Ghozali (2011;105) terdiri dari uji Normalitas, Multikolonieritas, dan Heteroskedastisitas :

1. Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Imam

Ghozali (2011;160). Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas data dapat menggunakan uji histogram, uji normal P Plot/ uji Chi Square, Skewness dan kurtosis atau Kolmogrov-Smirnov (K-S) melalui program SPSS version 22.0 for windows. Apabila nilai *Assymmtoticant significant* > 0,05 maka data dikatakan telah terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan uji nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Guna mengetahui ada tidaknya multikolonieritas yaitu dengan cara melihat nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu (Imam Ghozali 2011:105) :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,09 maka dapat dikatakan telah menjadi multikolonieritas.
- b. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
- c. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu residual pengamatan ke residual pengamatan lain. Pada penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser (Imam Ghozali, 2011 :139). Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Dengan dasar analisis :

- a. Tingkat signifikansi $> 5\%$, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Tingkat signifikansi $< 5\%$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis Regresi sederhana untuk mengukur pengaruh antara satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. model persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Rumus :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots\dots\dots$$

Keterangan :

Y : Kinerja Individual

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X₁ : Transparansi

X₂ : Partisipasi

X₃ : Aturan Hukum

X₄ : Efektivitas dan Efesiensi

X₅ : Akuntabilitas

e : *error*

3.9 Uji Hipotesis

Uji statistik koefisien korelasi product moment (r) digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T-test yaitu dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Uji parsial dengan t-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial t-test pada output SPSS dapat dilihat pada *tableCoefficientsa* . Formulasi hipotesis yang diajukan yaitu :

1. Ho: Masing-masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. Ha: Masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu :

1. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) berarti hipotesis terbukti maka H_0 ditolak dan H_a diterima, bila dilakukan uji secara parsial.
2. Sebaliknya jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) berarti hipotesis tidak terbukti maka H_0 diterima H_a ditolak, bila dilakukan uji secara parsial

3.10 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (pengaruh *coreproduct* dan *augmentedproduct*) sangat terbatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah provinsi Riau. Ibu kota Kampar yaitu Bangkinang. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah sekitar 27.908,32 km merupakan daerah yang terletak antara 100°40' Lintang Utara sampai 102°00' Lintang Selatan dan 100°28'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar antara lain meliputi:

1. Di sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
2. Di sebelah selatan Kabupaten Kuantan Singingi
3. Di sebelah barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)
4. Di sebelah timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

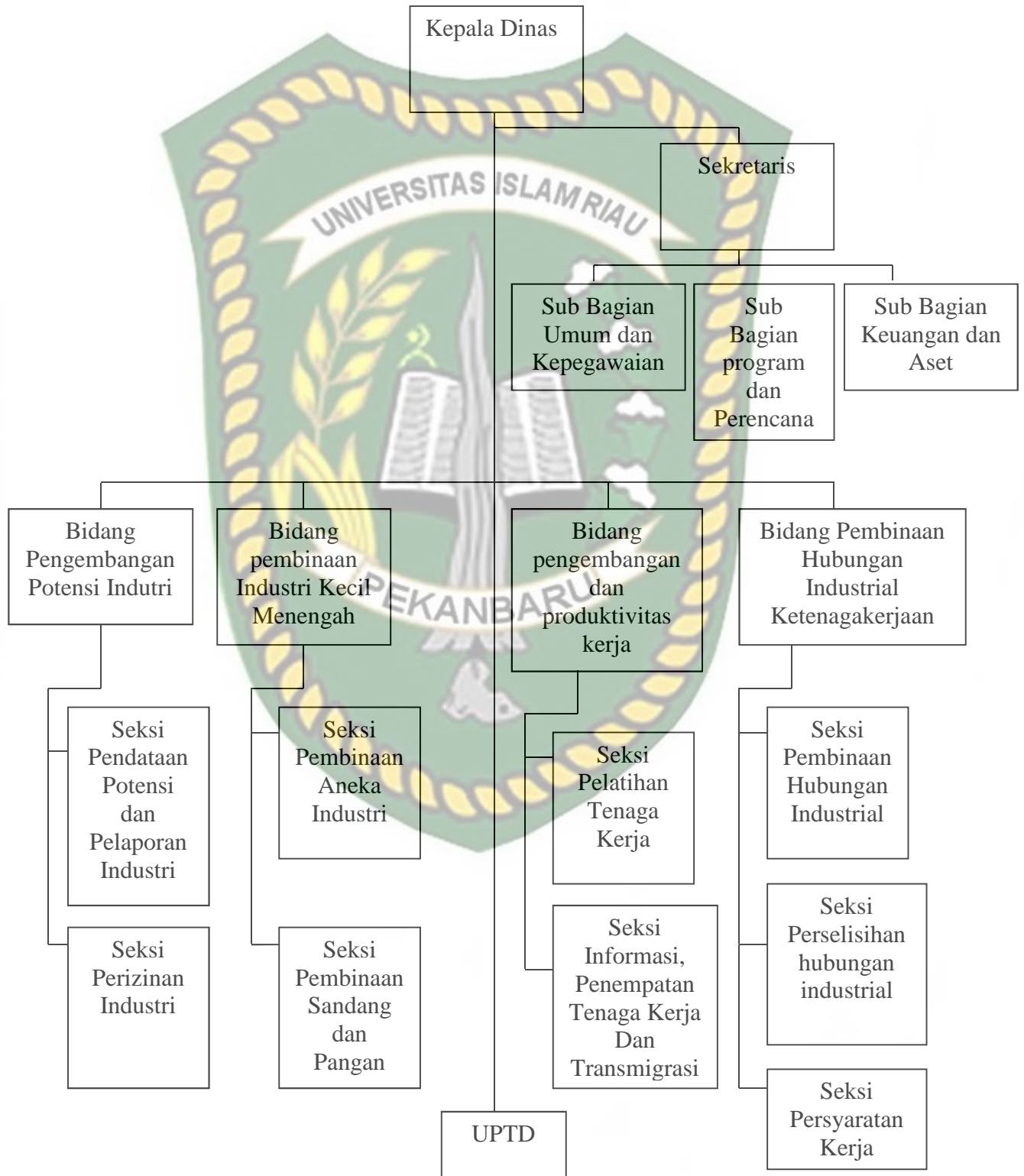
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program dan Perencanaan; Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pengembangan Potensi Industri terdiri dari Seksi Pendataan Potensi dan Pelaporan Industri; Seksi Perizinan dan Pengawasan Industri; Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
4. Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari Seksi Pelatihan Tenaga Kerja; Seksi Informasi; Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari Seksi Pembinaan Hubungan Industrial; Seksi Perselisihan Hubungan Industrial; Seksi Pengawasan Perlindungan dan Perizinan Tenaga Kerja.

4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dapat dilihat dari gambar IV.1 dibawah ini :

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja



4.3 Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mempunyai fungsi melaksanakan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan serta pengembangannya. Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah bidang usaha industri dan perdagangan dan tugas pembentukan yang diserahkan oleh Bupati. Selain itu, Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan
2. Penyusunan Rancangan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Menyelenggarakan Pengaturan Kemitraan IKDK (Industri Kecil dan Dagang Kecil) dengan Perusahaan Besar dan Menengah.
4. Menyelenggarakan Pemantauan atau Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Sembilan Bahan Pokok, Barang Strategis dan Barang Penting lainnya
5. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian, Perizinan, Tertip Usaha, dan Perlindungan Konsumen
6. Melaksanakan Pengembangan Hasil Industri dan Pertanian
7. Melaksanakan Pengawasan Penetapan Standart Industri dan Produk tertentu yang berkaitan dengan Keamanan dan Keselamatan Umum, kesehatan dan Kerusakan Lingkungan.

8. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pergudangan
9. Pelaksanaan Konservasi dan Inventarisasi dibidang Industri dan Perdagangan
10. Melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan terhadap Perusahaan Perdagangan dan Industri
11. Menyelenggarakan Pembinaan Produksi Industri, Sarana dan Prasarana Perdagangan
12. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan atau Peralatan, Perencanaan Organisasi dan Ketatalaksanaan Dinas.
13. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang dibrikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
14. Pengelolaan Unit Pelaksaan Teknis (UPTD)

Adapun pembagian tugas mengenai Pembinaan Industri Kecil terdapat pada Bidang Perindustrian yaitu pada Seksi Pembinaan Industri Kecil, Menengah dan Besar yang di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan.

4.4 Hasil Pengumpulan Data dan Demografi Responden

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Total kuisioner yang dibagikan adalah 35 kuisioner (100%), total kuisioner yang dikembalikan 33 kuisioner (94,3%), maka dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1
Jumlah Sampel dan Tingkat Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase %
Total Kuisioner yang dikirim	35	100
Total kuisioner yang kembali	33	94,3
Total kuisioner yang tidak kembali	2	5,7
Kuisioner yang tidak dapat dianalisis	0	0
Total kuisioner yang dianalisis	33	94,3

Karakteristik 33 Responden akan dianalisis dalam penelitian ini meliputi : Nama Responden, Jenis kelamin, Pendidikan terakhir, dan Jabatan/Posisi. Data demografi responden dapat dilihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2
Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Pria	23	69,7%
2. Wanita	10	30,3%
Total	33	100%
Pendidikan Terakhir		
1. SMU & sederajat	-	-
2. D3	11	33,3%
3. S1	20	60,6%
4. S2	2	6,06%
Total	33	100%
Jabatan/Posisi	44	
4.5 Bagian SDM dan Umum	15	45,5%

4.6 Bagian Keuangan	10	30,3%
4.7 Bagian Lainnya	8	24,2%
Total	33	100%
Lama Bekerja		
1. < 1 tahun	-	
2. 1- 2 tahun	13	39,4%
3. 3-5 tahun	14	42,4%
4. > 5 tahun	6	18,2%
Total	33	100%

Sumber : Data *Olahan* 2019

4.5 Statistik Deskriptive

Statistik deskriptive dimaksudkan untuk mengetahui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu Transparansi, Partisipasi Aturan Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil kuisioner, Tabel V.3 memperlihatkan hasil *descriptive statistics* sebagai berikut :

Tabel V.3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSPARANSI	33	9,00	15,00	12,5758	1,69614
PARTISIPASI	33	9,00	15,00	11,8182	1,97570
ATURAN HUKUM	33	8,00	15,00	11,5152	1,88946
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI	33	9,00	15,00	12,3636	1,69223
AKUNTABILITAS	33	9,00	15,00	12,2121	1,59604
KINERJA KEUANGAN	33	30,00	48,00	39,5758	4,35194
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Pada tabel *descriptive statistics*, menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah sebesar 39,57 dengan

standar deviasi 4,35 . Untuk variabel Transparansi, nilai rata-rata yang mempengaruhi kinerja individual dari 33 responden adalah sebesar 12,60 dengan standar deviasi 1,70 . Untuk variabel Transparansi nilai rata-rata yang mempengaruhi kinerja individual dari 33 responden adalah sebesar 11,82 dengan standar deviasi 1,70. Untuk variabel Aturan Hukum nilai rata-rata yang mempengaruhi kinerja individual dari 33 responden adalah sebesar 11,52 dengan standar deviasi 1,98. Untuk variabel Efektivitas dan Efisiensi nilai rata-rata yang mempengaruhi kinerja individual dari 33 responden adalah sebesar 12,36 dengan standar deviasi 1,70. Dan yang terakhir yaitu variabel Akuntabilitas nilai rata-rata yang mempengaruhi kinerja individual dari 33 responden adalah sebesar 12,21 dengan standar deviasi 1,60.

4.6 Uji Kualitas Data

4.7 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu instrumen dikatakan valid bila nilai person correlation terhadap skor total diatas 0,30. Data menunjukkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dalam variabel Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan variabel Kinerja keuangan lebih besar dari 0,3 sehingga seluruh indikator tersebut telah memenuhi syarat validitas data. Hasil dari pengujian validitas dapat dilihat tabel V.4 berikut ini :

Tabel V.4
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	<i>Person correlation</i>	Kesimpulan
Kinerja Keuangan (Y)	0,695** - 0,878**	Valid

Transparansi (X1)	0,828** - 0,886**	Valid
Partisipasi (X2)	0,878** - 0,935**	Valid
Aturan Hukum (X3)	0,704** - 0,864**	Valid
Efektivitas dan Efisiensi (X4)	0,782** - 0,905**	Valid
Akuntabilitas (X5)	0,648** - 0,816**	Valid

Sumber : Data *Olahan* 2019

Pada tabel V.4 dapat dilihat bahwa skor masing-masing butir dan skor total (*pearson correlation*) menunjukkan korelasi signifikan pada level 0,05 sehingga seluruh kuisioner dinyatakan valid.

4.8 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *reliability analysis* dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar $>0,70$. Dibawah ini adalah tabel V.5 yang merupakan Hasil uji reliabilitas :

Tabel V.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Croanbach Alpha</i>	Kesimpulan
Kinerja Keuangan (Y)	10	0,908	Reliabel
Transparansi (X1)	3	0,827	Reliabel
Partisipasi (X2)	3	0,881	Reliabel
Aturan Hukum (X3)	3	0,739	Reliabel
Efektivitas dan Efisiensi (X4)	3	0,805	Reliabel
Akuntabilitas (X5)	3	0,756	Reliabel

Sumber : Data *Olahan* 2019

Hasil Pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel menunjukkan tidak ada koefisien *croanbach alpha* yang kurang dari 0,70. Sehingga, instrumen tersebut reliabel untuk digunakan.

4.9 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (*Best Linier Unbias Estimator/BLUE*) dari suatu persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square*) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi pesyaratan asumsi klasik yaitu sebagai berikut :

4.10 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal. Untuk dapat melihat apakah data yang terdistribusi normal dapat dilihat dengan menggunakan uji non parametrik satu sampel *kolmogrov-Smirnov Test*, dan *Normal Probability* plot dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel V.6

Tabel V.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,26732903
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,103
	Negative	-,108
Test Statistic		,108
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data output SPSS, 2019

Gambar diatas menunjukkan koefisien *Asymp.sig* (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.11 Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS yang dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) persamaan regresi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.7 sebagai berikut :

Tabel V.7
Uji Multikoloniearitas Persamaan Regresi 1

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,021	,698			
	TRANSPARANSI	-,372	,165	-,483	,306	3,271
	PARTISIPASI	,196	,095	,296	,670	1,492
	ATURAN HUKUM	,140	,088	,203	,857	1,167
	EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI	,492	,146	,638	,388	2,578
	AKUNTABILITAS	,530	,121	,648	,643	1,556

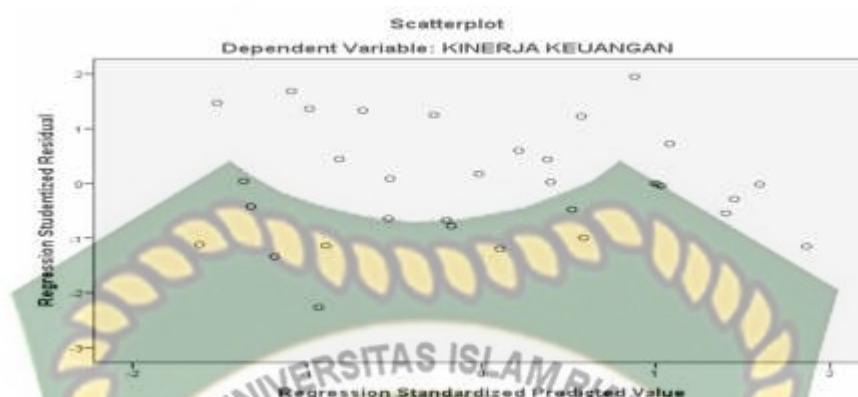
a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN
Sumber : Data Output SPSS, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari kedua variabel independen lebih dari 0,1 atau VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4.12 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas data dapat dilihat pada gambar V.1 dibawah ini :

Gambar V.1



Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.14 Teknik Analisis Data

Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis hubungan linear antara 4 variabel independen atau lebih dengan 1 variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda pada persamaan regresi dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel V.8 sebagai berikut :

Tabel V.8

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,021	,698		,030	,976
	TRANSPARANSI	-,372	,165	-,483	-2,261	,032
	PARTISIPASI	,196	,095	,296	2,052	,050
	ATURAN HUKUM	,140	,088	,203	1,591	,123
	EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI	,492	,146	,638	3,359	,002
	AKUNTABILITAS	,530	,121	,648	4,397	,000

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

Sumber : Data output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel V.8 persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots$$

$$KK = 0,021 - 0,372 X_1 + 0,196 X_2 + 0,140 X_3 + 0,492 X_4 + 0,530 X_5 + e$$

Hasil dan pembahasan dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 0,021 artinya jika Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum Efektivitas dan Efisiensi, serta Akuntabilitas bernilai 0 (nol) maka kinerja Keuangan bernilai 0,021.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (X_1) bernilai Negatif, yaitu - 0,372 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Transparansi sebesar 1 maka akan mengakibatkan penurunan Kinerja Keuangan sebesar -0,372, dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi (X_2) bernilai positif, yaitu 0,196 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Partisipasi sebesar 1 maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,192, dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Aturan Hukum (X_3) bernilai positif, yaitu 0,140 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Aturan Hukum sebesar 1 maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,140, dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.
- e. Nilai koefisien regresi variabel Efektivitas dan Efisiensi (X_4) bernilai positif, yaitu 0,492 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Efektivitas dan

Efisiensi sebesar 1 maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,492, dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

- f. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X5) bernilai positif, yaitu 0,530 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Akuntabilitas sebesar 1 maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,530, dengan asumsi variabel lain bernilai konstan.

4.15 Pengujian Hipotesis

4.16 Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap kinerja individu. Pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan apabila signifikansi $> 5\%$ maka hipotesis ditolak. Hasil uji t terhadap variabel penelitian pada persamaan regresi dapat dilihat pada tabel V.9 dibawah ini :

Tabel V.9
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,030	,976
TRANSPARANSI	-2,261	,032
PARTISIPASI	2,052	,050
ATURAN HUKUM	1,591	,123
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI	3,359	,002
AKUNTABILITAS	4,397	,000

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

Sumber : Data output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 9, Hasil pengujian secara parsial atau hasil Uji t adalah sebagai berikut:

- d. Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada model regresi diperoleh nilai $t = -2,261$ dengan signifikansi sebesar $0,032 < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, artinya secara parsial variabel Transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
- e. Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada model regresi diperoleh nilai $t = 2,052$ dengan signifikansi sebesar $0,050$ sama dengan (=) nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, artinya secara parsial variabel partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
- f. Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada model regresi diperoleh nilai $t = 1,591$ dengan signifikansi $0,123$. Nilai signifikansi tersebut lebih dari nilai $\alpha = 0,05$ ($0,123 > \alpha = 0,05$) maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, menunjukkan bahwa variabel Aturan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
- g. Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada model regresi diperoleh nilai $t = 3,359$ dengan signifikansi $0,002$. Nilai signifikansi tersebut kurang dari nilai $\alpha = 0,05$ ($0,002 < \alpha = 0,05$) maka H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, yang artinya menunjukkan bahwa variabel Efektivitas dan Efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- h. Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada model regresi diperoleh nilai $t = 4,397$ dengan signifikansi $0,000$. Nilai signifikansi tersebut kurang dari nilai $\alpha =$

0,05 ($0,000 < \alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

4.17 Uji secara simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, serta Akuntabilitas secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Hasil uji F terhadap variabel penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 22.00 dapat dilihat pada tabel V.10 sebagai berikut :

Tabel V.10
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,774	5	,755	8,911	,000 ^b
	Residual	2,287	27	,085		
	Total	6,061	33			

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS, PARTISIPASI, ATURAN HUKUM, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, TRANSPARANSI

Sumber : Data output SPSS, 2019

Dari hasil output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA atau uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,911 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat probabilitas signifikan $< \alpha = 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, serta Akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

4.18 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi atau R^2 dapat dilihat dari tabel V.11 *Model Summary* Kolom *R Square* berikut :

Tabel V.11

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,789 ^a	,623	,553	,29103

a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS, PARTISIPASI, ATURAN HUKUM, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, TRANSPARANSI

b. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

Sumber : Data output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel V.11 menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0,623. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah Transparansi, Partisipasi, Aturan Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, serta Akuntabilitas menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja keuangan sebesar 62,3% sedangkan sisanya 37,7% (100%-62,3%) dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi. Misalnya, variabel responsif dan lain-lain

Standar error of the estimate adalah ukuran kesalahan yang diperoleh sebesar 0,29103 artinya kesalahan dalam memprediksi Kinerja keuangan sebesar 0,29103 dimana semakin kecil *standar error of estimate (SEE)* ini maka akan membuat model regresi ini semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.19 Pembahasan Hasil Penelitian

5 Implementasi prinsi-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di Kabupaten Kampar.

Hasil uji pengaruh prinsip *good governance* transparansi terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa Transparansi mempunyai pengaruh negative terhadap kinerja keuangan, yang berarti semakin tinggi transparansi, maka akan mengurangi efektivitas kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

Hal ini berarti bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong kinerja karyawannya dalam penerapan prinsip transparansi ini secara berkelanjutan. Jika Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja mengembangkan menerapkan prinsip transparansi dengan baik, maka kinerja karyawannya akan meningkat. Sebaliknya jika Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja tidak mengembangkan teknologi informasi manajemennya dengan baik, maka kinerja karyawannya akan menurun dan akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Dinas tersebut. Dwiyanto (2006) mengemukakan bahwa jika tidak adanya transparansi dalam birokrasi pelayanan publik, maka banyak masyarakat yang akan mengalami frustrasi.

Adi Setiadi (2010) bahwa pemahaman prinsip transparansi bagi pegawai tentang konsep transparansi hanya terbatas pada keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sifatnya formal, sementara bagi kelompok pengguna/pelaku usaha, konsep transparansi dipahami lebih luas menyangkut besarnya penetapan

tarif setiap pengurusan surat-surat, kebebasan mengakses informasi dan keterbukaan dalam penyusunan program-program dinas yang berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha itu sendiri.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dan tidak mendukung dengan hasil penelitian Hasudungan Napitupulu (2015), Frediawan (2008), Hindistari (2015), Fauziah (2016) dan Febriani (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas kinerja pegawai. Dengan demikian, transparansi harus menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. supaya diterapkan dengan baik untuk meningkatkan kinerja pegawai yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangannya.

I. Implementasi prinsi-prinsip good governance dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten kampar.

Hasil uji pengaruh prinsip *good governance* Partisipasi terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa Prinsip Partisipasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa apabila prinsip akuntabilitas dilakukan dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Hasil diperoleh dari analisis antara prinsip partisipasi dengan kinerja keuangan didapatkan informasi bahwa responden yang menyatakan kinerja baik dan partisipatif berada pada kategori yang baik. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk turut aktif memberikan dukungan dan partisipasi atas setiap program atau kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kabupaten Kampar. Sehingga pemerintah daerah serta pegawainya bersama-sama bekerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perindustrian dan Tenaga Kerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurwahida, dkk (2012) yang membuktikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* yaitu Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dinas kesehatan Kabupaten Wajo. Hasil sejalan juga ditemukan oleh Windiarso (2015) dan Madjir (2015).

I. Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten kampar.

Berdasarkan Tabel V.8 dapat disimpulkan bahwa hasil uji pengaruh prinsip *good governance* aturan hukum terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa aturan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari fahrozi (2014) yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai. Dari nilai yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa lembaga penegakan hukum di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum dijalankan dengan baik sesuai undang-undang yang di tetapkan yang seharusnya ditetapkan tanpa melihat status sosial, dalam artian penegakan hukum di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berlaku adil bagi semua pihak tanpa terkecuali.

I. Implementasi prinsi-prinsip good governance dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten kampar.

Hasil uji pengaruh prinsip *good governance* Efektivitas dan Efisiensi terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa Efektivitas dan Efisiensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa apabila pegawai melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya secara Efektif dan Efisiensi, maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Ovi Aldino (2015) mengenai pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yaitu Transparansi, Partisipasi, Efektivitas, Responsibilitas terhadap kinerja keuangan kantor unit pelayanan terpadu di dinas pendapatan daerah kota medan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan meningkatkan kinerja pegawai pemerintah. Semakin efektif dan efisien nya kinerja pegawai maka akan berpengaruh terhadap laporan keuangan.

I. Implementasi prinsi-prinsip good governance dalam pengelolaan pada dinas perindustrian dan tenaga kerja di kabupaten kampar.

Hasil uji pengaruh prinsip *good governance* Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa apabila prinsip akuntabilitas dilakukan dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nita Garnita (2008), Hindistari (2015) dan Fauziah (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja.

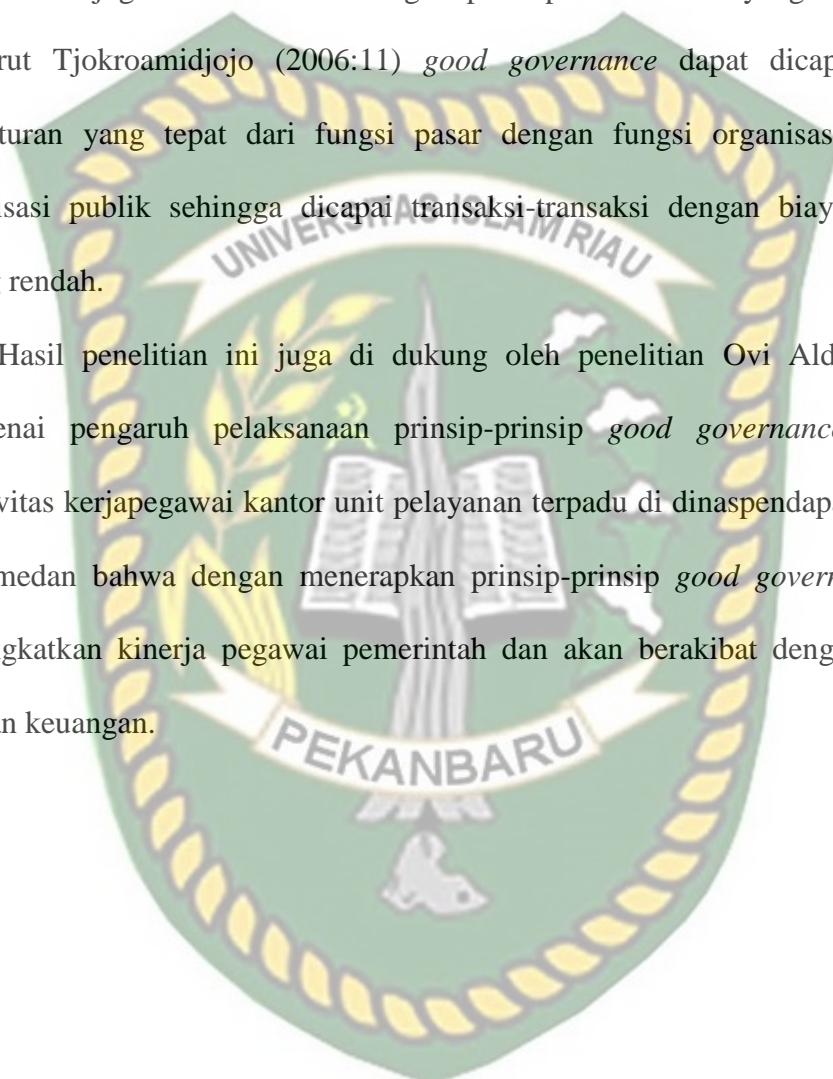
5.14 Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Tabel V.10.ANOVA dapat disimpulkan bahwa pengaruh prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kinerja keuangan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berpengaruh secara signifikan.

Mengenai hubungan antara penerapan *Good governance* dengan kinerja Keuangan menyatakan bahwa Penerapan prinsip *Good governance* berasosiasi dengan kinerja organisasi. Suatu organisasi akan sangat terbantu kinerjanya apabila dalam organisasi tersebut menerapkan *Good governance*, begitu juga dalam pemerintahan apabila *Good governance*-nya bagus maka kinerjanya juga akan bagus, dan hal itu akan membuat output yang dihasilkan juga akan bagus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penerapan *Good governance* merupakan suatu hal yang tepat.dalam suatu pemerintah.

Menurut Pratikno (2009:10), *Good governance* selain merujuk mekanisme pasar yang dianggap paling efisien dalam pengelolaan sumberdaya, *good governance* juga dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. Menurut Tjokroamidjojo (2006:11) *good governance* dapat dicapai melalui pengaturan yang tepat dari fungsi pasar dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya transaksi paling rendah.

Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Ovi Aldino (2015) mengenai pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap efektivitas kerjapegawai kantor unit pelayanan terpadu di dinaspendapatan daerah kota medan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan meningkatkan kinerja pegawai pemerintah dan akan berakibat dengan kualitas laporan keuangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip Transparansi berpengaruh secara negative terhadap kinerja keuangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
2. Penerapan prinsip Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
3. Penerapan prinsip Aturan Hukum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
4. Penerapan prinsip Efektivitas dan Efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
5. Penerapan prinsip Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
6. Prinsip-prinsip *Good Governance* secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

5.2 Saran

1. Penerapan prinsip Transparansi pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum diterapkan dengan baik karena kurang dalam penjelasan program kerja yang akan dilakukan.
2. Penerapan prinsip Good Governance Partisipasi sudah ada pengaruh namun masih ditandai dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam Mengikuti seluruh informasi mengenai program yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.
3. Penerapan prinsip Good Governance Aturan Hukum belum diterapkan secara signifikan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Seharusnya, pimpinan melakukan kontrol terhadap pegawai sesuai dengan ketentuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Danang, Sunyoto. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Buku Seru.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham, 2011, Analisa Laporan Keuangan, Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu. 2012. "Manajemen Sumber Daya manusia". Jakarta: PT Bumi Aksara
- Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 17. Edisi ke 5. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mayangsari, Lillananda Putri dan Andayani. 2015, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Financial Distress", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.4.
- Mulyawan, Budi. 2009. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap kinerja Organisasi. Universitas Sumatera Utara
- Munawir, S. 2010. Analisis laporan Keuangan, Edisi keempat. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta:Liberty
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
- Sedarmayanti. 2009. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). BagianKedua. Bandung. CV. Mandar Maju
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara

- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung; CV Alfabeta.
- Sudarmanto, 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi) Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulum, Ihyaul & Hafiez Sofyani. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. No. 25/2008
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar